BERSAMA-SAMA
SELAMATKAN UANG RAKYAT

Mencegah menggelembungnya subsidi BBM
yang tidak adil dan salah sasaran

Edisi Buku Saku

Bersama-sama Selamatkan Uang Rakyat

Disusun oleh:
Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi
Bahan Bakar Minyak

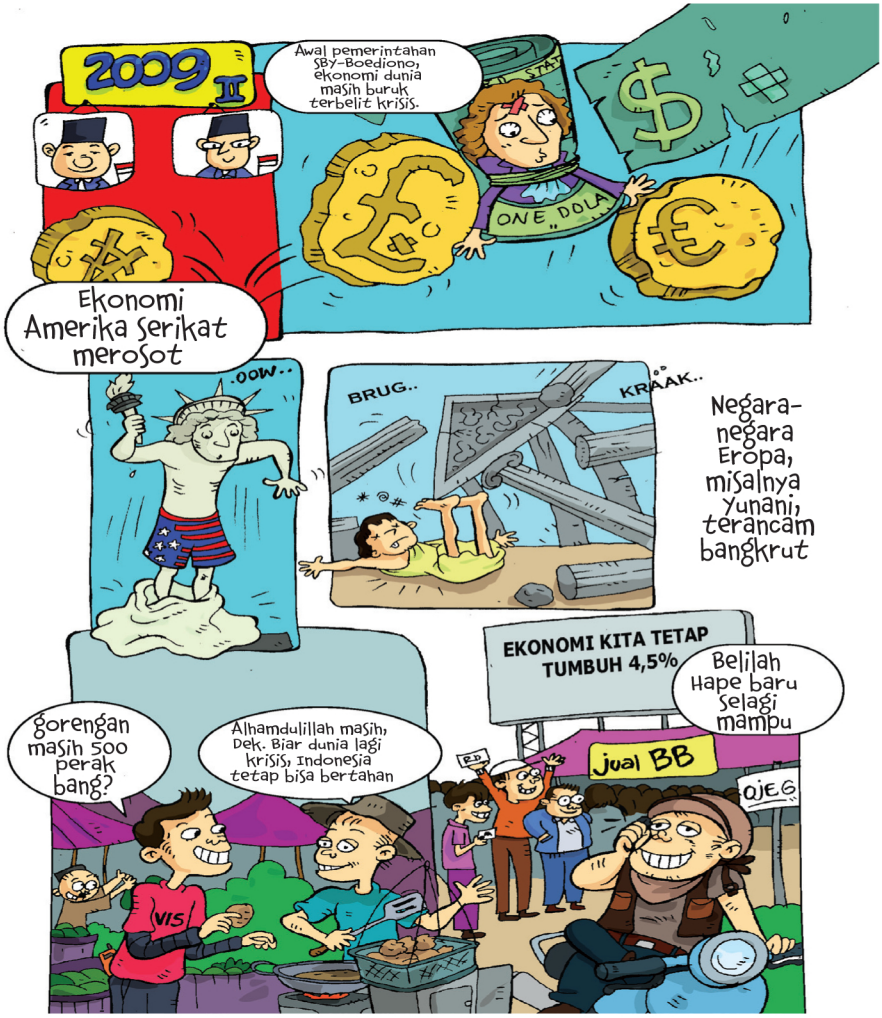
Joko Sulistyo (Tata Letak)

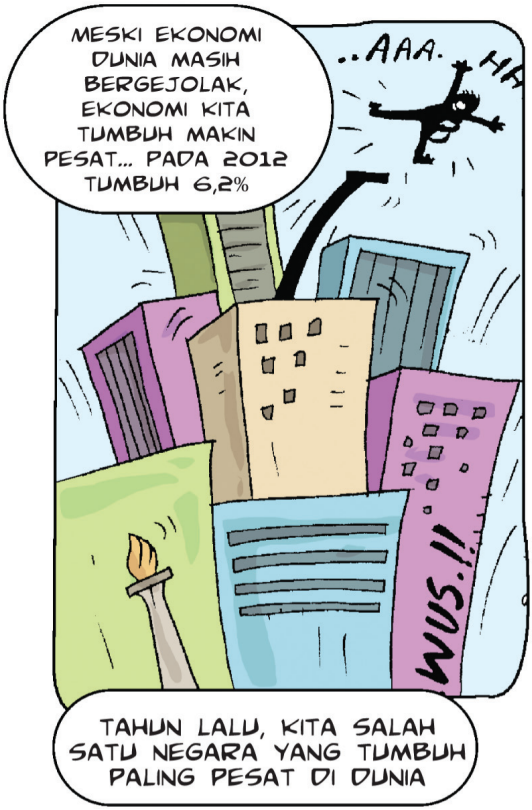
Komik oleh:
@irfanamalee (Creative Director)
Zahra Safirah (Naskah)
Isnaeni (Illustrator)
Diman (Layout)

Buku GRATIS ini dapat diperbanyak dengan tidak mengubah kaidah serta isinya.

Syukurlah, Indonesia Selamat dari Krisis.

Di awal masa pemerintahan SBY-Boediono, 2009 lalu, situasi ekonomi dunia sangat buruk, masih krisis. Amerika Serikat resesi. Negara-negara Eropa seperti Yunani terancam bangkrut. Terkena hantaman krisis itu, syukurlah ekonomi kita mampu bertahan walaupun cuma bisa tumbuh sebesar 4,5% saja selama 2009.





Kita Selamat dan Tumbuh Pesat Lagi

Kendati ekonomi dunia masih bergejolak, di tahun-tahun berikutnya Pemerintah berhasil membawa ekonomi kita selamat dari krisis, bahkan tumbuh makin cepat. Ekonomi tumbuh berarti rakyat makin sejahtera. Inilah catatan pertumbuhan kita sejak 2009:

Omong-omong, tahun lalu, di seluruh dunia, hanya sedikit negara yang bisa tumbuh dan ekonomi kita termasuk tumbuh paling cepat.

Tahun	Pertumbuhan
2009	4,5%
2010	6,1%
2011	6,5%
2012	6,2%

Tapi Akibat Krisis Global, Kita Memikul Beban Berat

Kita selamat mengarungi krisis dunia. Tapi, ekonomi kita juga harus menanggung beban berat yang terus membesar dalam empat tahun terakhir. Negara kita sekarang harus tekor alias mengalami defisit. Bahkan, tak cuma satu, ada dua defisit yang mesti kita pikul:

- Defisit neraca perdagangan
- Defisit anggaran negara

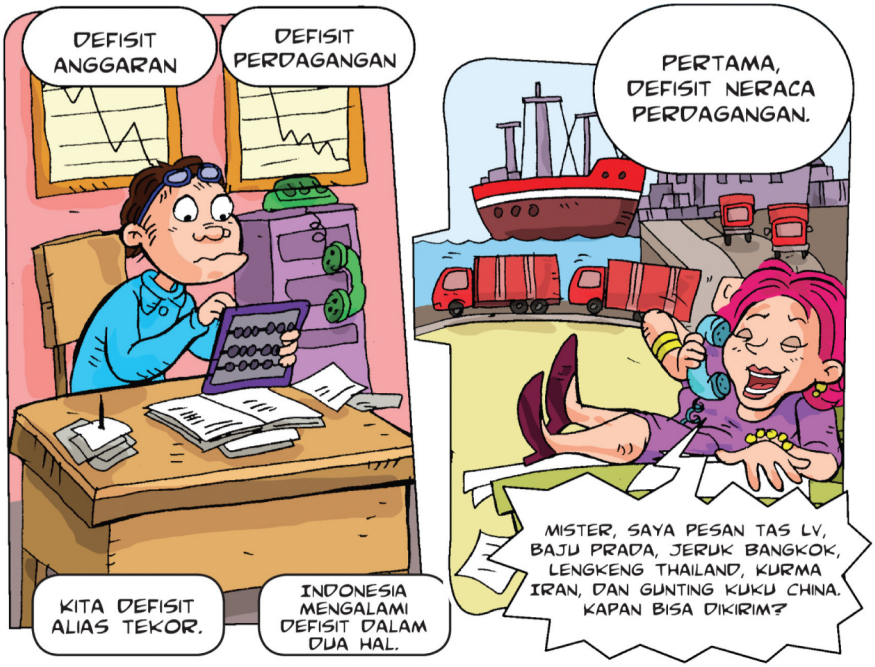
Apa sih dua defisit itu? Mari kita ikuti ceritanya:

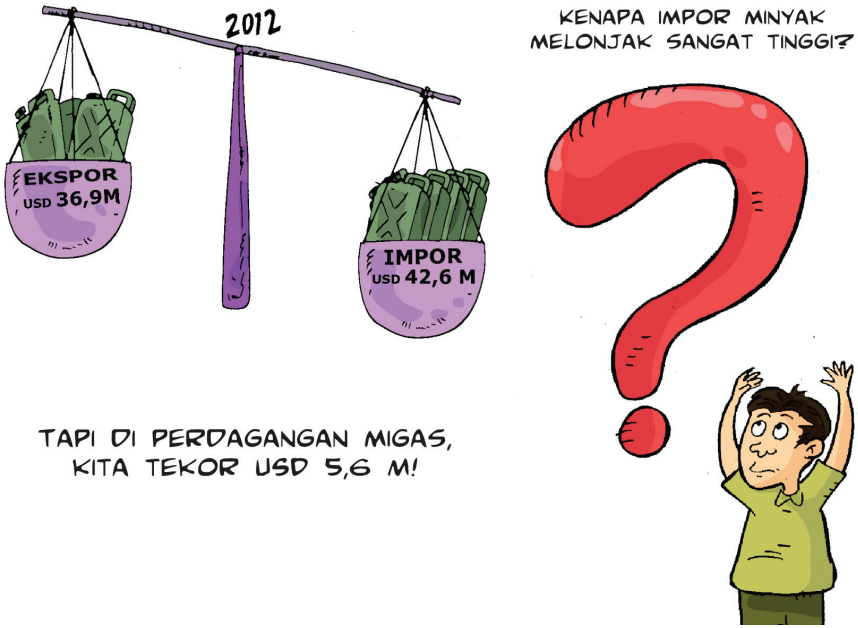


Defisit Neraca Perdagangan: Impor Meningkat, Ekspor Turun

Sederhananya, kita memikul defisit neraca perdagangan karena berbelanja (impor) dari luar negeri lebih besar daripada berjualan (ekspor) ke luar negeri. Nilai belanja (impor) Indonesia lebih besar karena harga barang-barang jualan (ekspor) kita, seperti minyak sawit dan batubara, merosot terpengaruh krisis. Maka, selama 2012, neraca dagang kita tekor. Hasil jualan (ekspor) kita US$ 190,04 miliar sementara pengeluaran belanjanya (impor) US$ 191,67 miliar. Kita tekor US$ 1,63 miliar.

Neraca Perdagangan kita tekor untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir.

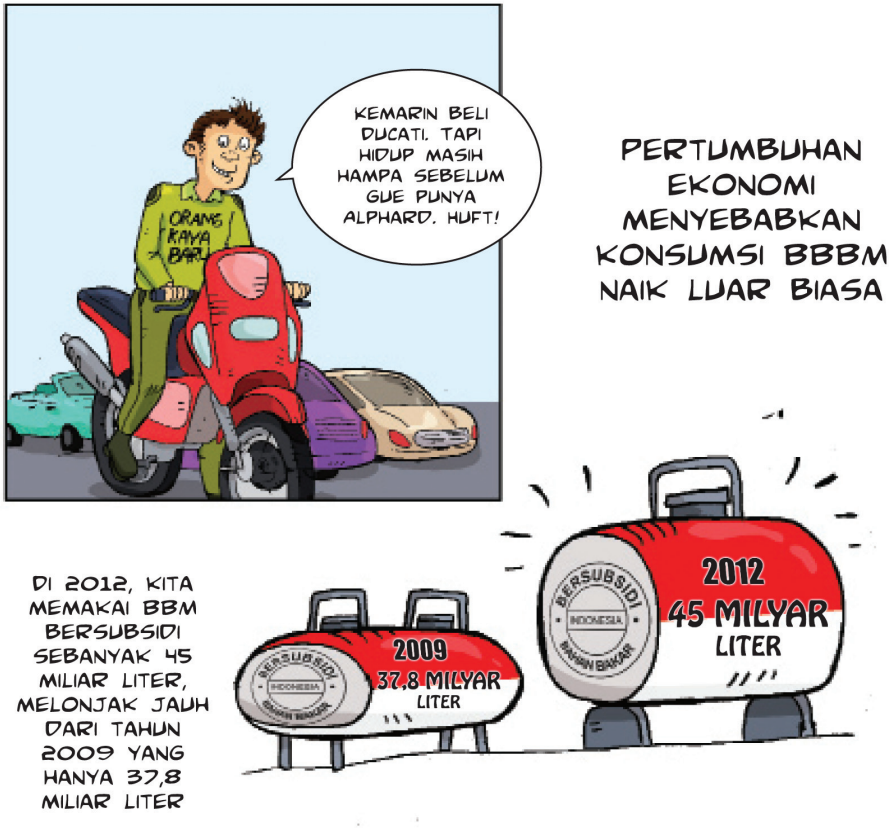




Kita Tekor Sangat Besar di Perdagangan Minyak dan Gas (migas)

Yang membuat kita tekor, terutama, adalah perdagangan minyak dan gas (migas). Indonesia memang masih negara produsen migas. Namun, minyak yang kita jual (ekspor) kini lebih kecil nilainya dibandingkan dengan nilai minyak yang harus kita beli (impor). Itu sebabnya neraca dagang kita tekor.

Sebetulnya, dari jual-beli barang non-migas pada 2012 kita masih punya lebihan (surplus) US$ 3,97 miliar. Tapi, di jual-beli migas kita tekor US$ 5,6 miliar! Maka, pada 2012 neraca perdagangan kita tekor US$ 1,63 miliar. Sekali lagi, kita baru mengalami lagi defisit neraca perdagangan sejak 1961.

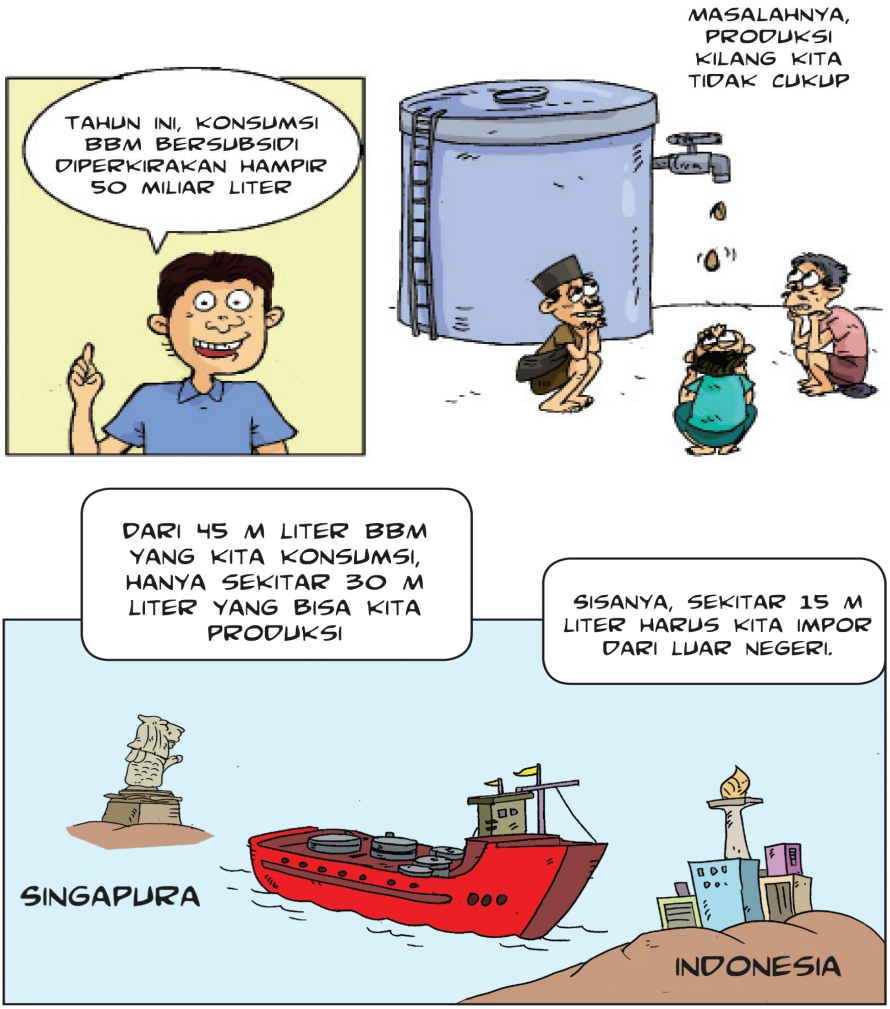


Impor Minyak Melonjak karena Konsumsi Naik Gila-gilaan

Impor minyak kita naik tajam karena pertumbuhan ekonomi membuat konsumsi minyak kita melonjak luar biasa. Jika pada 2009 kita membakar BBM sebanyak 37,8 miliar liter, pada 2012 total pemakaian BBM yang bersubsidi itu meningkat sangat tajam, menjadi 45 miliar liter. Tahun ini, konsumsi BBM bersubsidi kita diperkirakan hampir 50 miliar liter!

Padahal Produksi Kilang Kita tidak Cukup

Ketika kemajuan ekonomi membuat konsumsi BBM melonjak, kilang-kilang kita tidak mampu lagi memenuhi permintaan. Pada 2012, dari 45 miliar liter BBM bersubsidi yang kita konsumsi, hanya sekitar 30 miliar liter BBM yang kita produksi sendiri. Sisanya, sekitar 15 miliar liter harus kita beli (impor) dari luar negeri.



Uang Rakyat untuk Menomboki Selisih Harga BBM pun Ikut Melonjak

Perlu kita ketahui, harga jual BBM di dalam negeri jauh lebih murah daripada harga beli (impor) nya. Lah, siapa yang menomboki selisihnya? Rakyat! Kita semua! Kita semua turut memikul beban itu karena uang untuk menomboki berasal dari uang pajak kita yang masuk kas negara. Selisih yang harus ditomboki itu muncul berupa subsidi di anggaran negara. Dari tahun ke tahun, subsidi untuk BBM terus menggelembung, sangat besar. Karena uang pajak tidak cukup, defisit yang makin besar juga membuat kita berutang semakin besar. Ini tidak adil pada anak cucu kita yang akan menanggung bebannya.





BBM Produksi Dalam Negeri juga Harus Disubsidi

Selain dari impor, kilang di dalam negeri juga menghasilkan BBM. Premium dan Solar produksi dalam negeri ini sekarang juga dijual dengan harga sama dan tetap Rp 4.500 per liter, tak peduli berapa pun harga minyak mentah di pasar dunia. Harga jual ini jauh di bawah harga pokoknya yang terus naik turun karena sebagian bahan baku kilang kita adalah minyak mentah impor yang harganya juga naik turun.

Coba lihat, harga pokok Premium dan Solar termasuk biaya distribusinya saat ini sekitar Rp 9.000 per liter. Selisihnya dengan harga jual yang hanya Rp 4.500 tadi menjadi beban rakyat dalam bentuk subsidi.

Ada Yang Bilang Harga Pokok BBM Dalam Negeri Mestinya Sangat Rendah, Itu Keliru

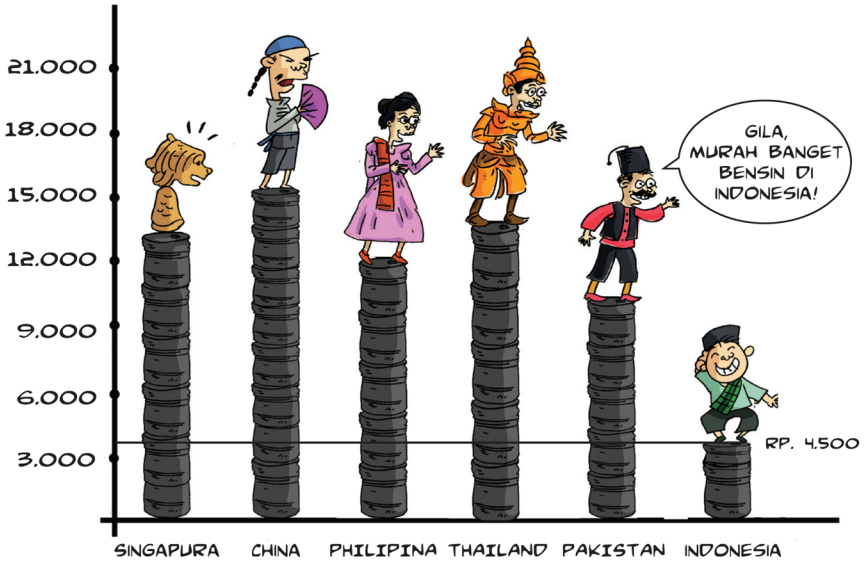
Ada politisi dan pakar yang mengklaim bahwa harga pokok BBM produksi dalam negeri seharusnya murah dan tidak memakai harga pasar sebagai patokan. Ini keliru sebab:

1. Sebagian minyak mentah yang diolah kilang dalam negeri juga harus diimpor. Belinya juga dengan harga pasar.

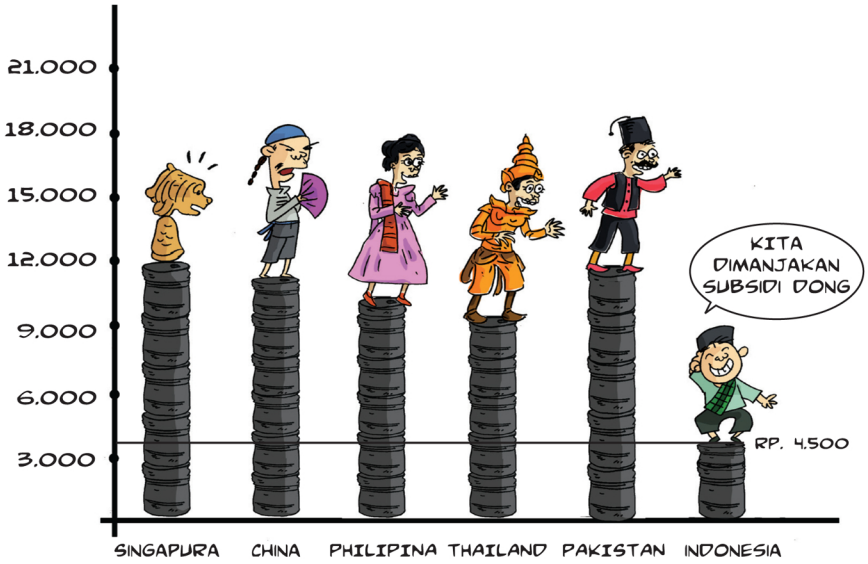
2. Banyak negara lain yang punya kilang dan minyak sendiri namun tetap tidak bisa menjual BBM untuk rakyatnya dengan harga sangat murah di bawah harga pasar. Di dunia ini hanya beberapa negara yang mampu menjual minyak murah kepada rakyatnya. Tapi, itu karena negara itu mampu menghasilkan minyak dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada kebutuhannya. Arab Saudi, misalnya. Kondisi Indonesia tidak seperti itu dan kita tidak akan mampu melakukannya karena kita sekarang justru harus mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan.

3. Dan yang tak kalah penting, memberi subsidi BBM dalam jumlah yang sangat besar adalah kebijakan yang tidak adil dan salah sasaran. Yang menikmati bukanlah rakyat miskin melainkan mereka yang sudah lebih mampu memiliki kendaraan pribadi.

HARGA BENSIN DI BEBERAPA NEGARA

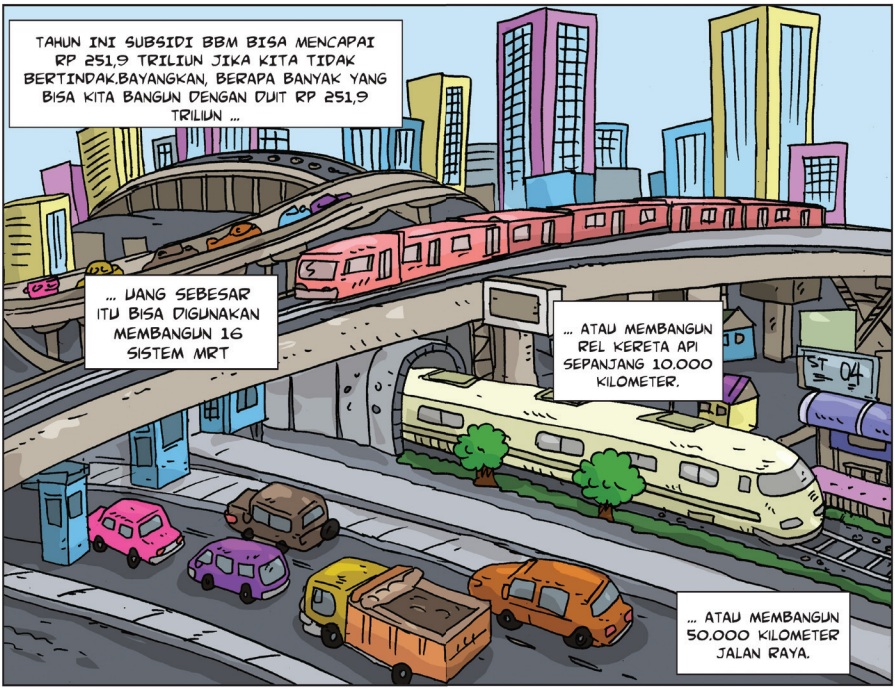


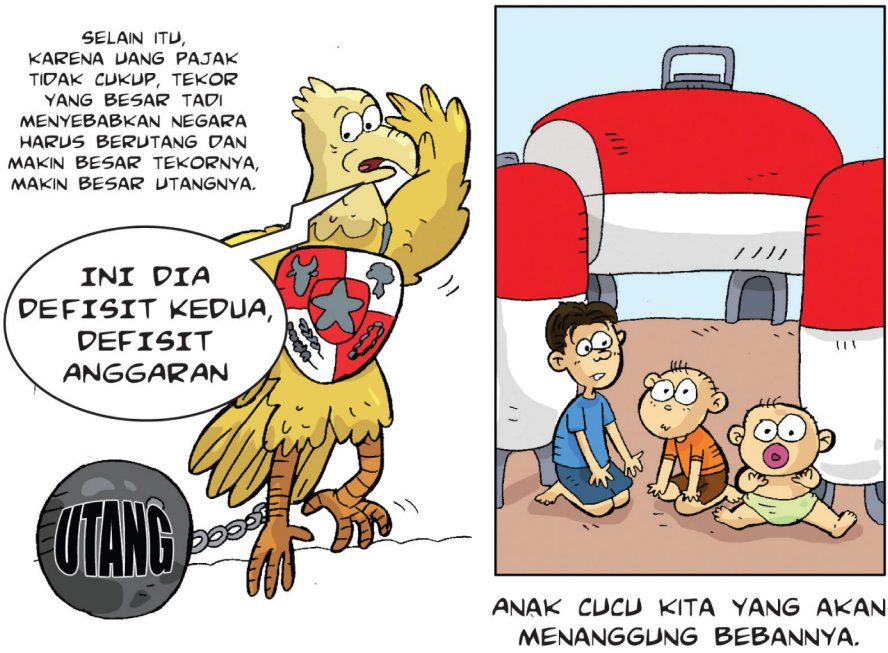
HARGA SOLAR DI BEBERAPA NEGARA



Jika Dibiarkan, Subsidi BBM Setahun Saja Cukup untuk Membangun 16 MRT

Kini, besarnya subsidi BBM sangat tidak masuk akal. Jika pada 2009 subsidi BBM Rp 52,4 triliun, tahun ini anggarannya mencapai Rp 193,8 triliun. Bahkan, jika kita tak sama-sama bertindak, jumlah subsidi selama 2013 bisa melonjak luar biasa sampai Rp 251,6 triliun. Ini kurang lebih cukup untuk membangun 16 sistem MRT seperti yang akan dibangun di Jakarta pada tahun ini. Atau 10.000 kilometer rel kereta, 50.000 kilometer jalan, 5.000 kilometer jalan tol, dan sebagainya. Sekadar gambaran saja, dengan dana sebesar itu, kurang lebih kita dapat membangun jalan tol menjalari seluruh Pulau Sumatera dari Aceh sampai Lampung.





Melonjaknya Subsidi BBM Membuat Anggaran Negara Tekor Luar Biasa

Inilah sumber defisit kedua yang kita bahas tadi. Subsidi BBM yang melonjak membuat anggaran negara tekor alias mengalami defisit yang sangat besar. Jika kita tidak bertindak apa-apa, secara total anggaran negara tahun ini bisa defisit Rp 353,6 triliun! Ini jauh di luar batas toleransi yang dibolehkan Undang-Undang. Dan, defisit artinya negara harus berutang. Utang adalah beban yang tidak adil bagi anak-cucu kita. Kita harus bertindak untuk menguranginya.





Berbagi Beban Menyelamatkan Keuangan Negara

Agar anggaran negara tidak jebol, kita bersama-sama harus mengambil langkah penyelamatan. Pemerintah mengusulkan kepada DPR pembagian beban sebagai berikut:

- Mengurangi subsidi BBM senilai Rp 42 triliun selama 2013. Untuk itu, harga Solar harus naik Rp 1.000 per liter dan harga Premium naik Rp 2.000 per liter.
- Memangkas belanja Pemerintah sebesar Rp 24,6 triliun di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah.

Harga BBM yang Lebih Masuk Akal Menurunkan Penyelewengan

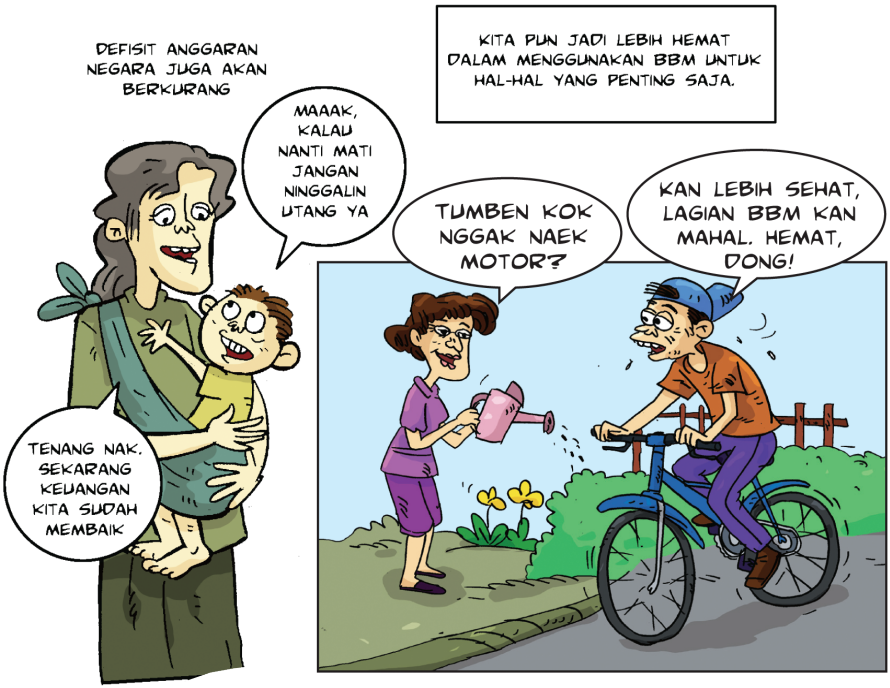
Selain menurunkan defisit anggaran negara, kenaikan harga BBM bersubsidi juga membuat selisih harganya dengan harga impor lebih kecil. Setidaknya, ini mengurangi potensi penyelewengan dan penyelundupan. Jelas, konsumsi BBM yang lebih rasional akan mengurangi beban subsidi. Defisit atau tekornya anggaran negara bekurang. Hasilnya, kebutuhan kita untuk berutang juga lebih kecil.



Konsumsi BBM yang Lebih Masuk Akal Menurunkan Defisit Perdagangan

Selain menurunkan potensi penyelewengan dan penyelundupan, harga BBM yang lebih masuk akal mendorong orang berhemat. Permintaan BBM pun menurun.

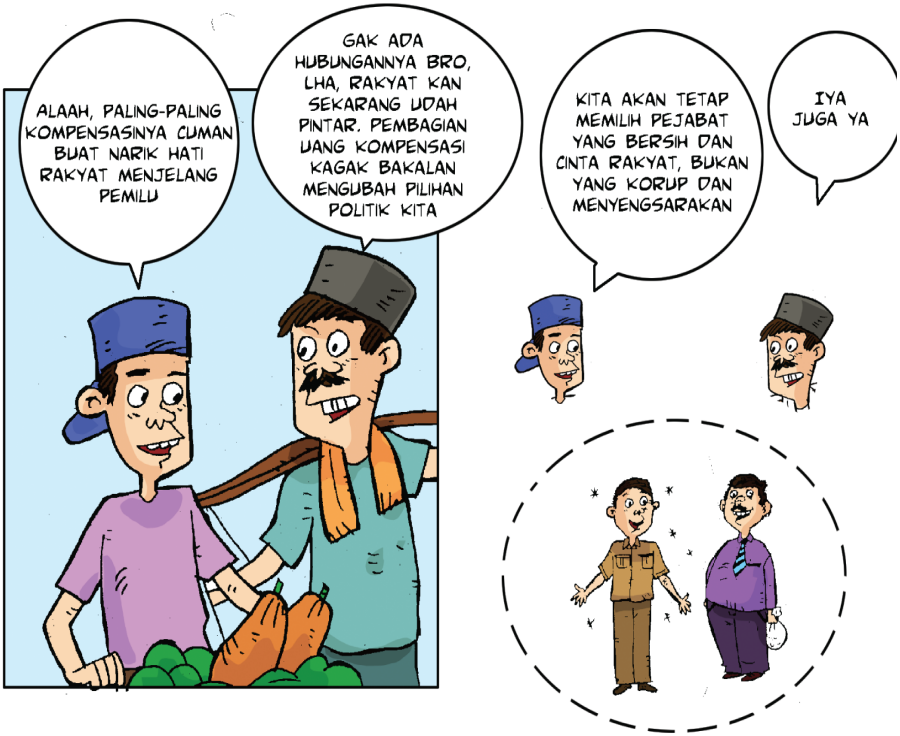
Karena tak ada penyelewengan, tak ada penyelundupan, dan masyarakat lebih hemat memakai BBM, konsumsi BBM menjadi lebih rasional. Berikutnya, impor minyak ikut turun. Maka, defisit neraca perdagangan yang menggelembung tadi dapat pula kita pangkas.





Untuk Meredam Dampak Kenaikan Ada Kompensasi bagi Rakyat Kecil

Mengurangi subsidi BBM jelas berdampak luas. Maka, Pemerintah menyiapkan dan mengusulkan ke DPR berbagai program kompensasi bagi rakyat tidak mampu. Ibarat suntikan obat kuat, berbagai program kompensasi ini akan membuat rakyat miskin lebih tahan mengatasi dampak kenaikan harga BBM.



Kompensasi bukan Sogokan Politik untuk Pemilihan Umum

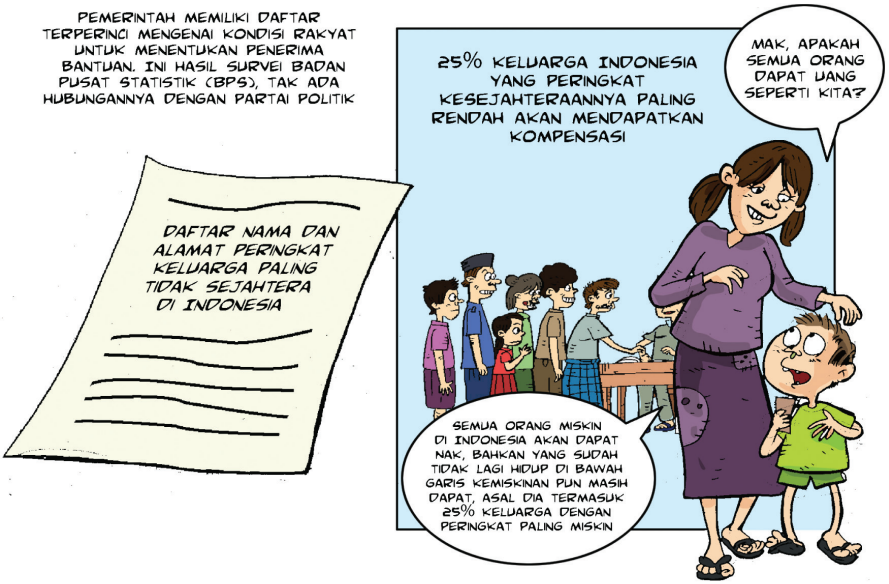
Berbagai program kompensasi itu tidak berhubungan sama sekali dengan pemilihan umum maupun pencarian simpati untuk partai politik yang pro Pemerintah. Rakyat juga sudah pintar, pilihan politiknya tak akan terpengaruh oleh pemberian uang, apalagi pemilihan umum baru akan berlangsung tahun depan. Partai oposisi tentu juga bisa turut mendukung program kompensasi jika menilai program ini dapat menarik simpati rakyat.

Pemerintah Punya Daftar 40% Keluarga Berperingkat Paling Tidak Sejahtera

Pemerintah kini juga sudah memiliki Basis Data Terpadu yang terperinci hingga nama dan alamat. Data hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) itu itu mencakup 40% keluarga yang berperingkat paling tidak sejahtera di Indonesia.

Ibaratnya, jika penduduk Indonesia hanya 100 keluarga, maka keluarga paling miskin nomor 1 hingga keluarga berperingkat 40 akan tercantum di data itu.

Karena ukurannya adalah tingkat kesejahteraan, daftar ini tak peduli apa partai, organisasi, suku atau agama. Selama satu keluarga masih tergolong 40% keluarga paling tidak sejahtera, namanya akan ada di sana. Dari sinilah Pemerintah menentukan keluarga mana yang layak menerima kompensasi.



25% Keluarga Indonesia akan Menerima Kompensasi, tanpa Peduli Aliansi Politik

Dari Basis Data Terpadu tadi, Pemerintah menetapkan batas 25% keluarga yang akan menjadi penerima program kompensasi. Inilah usulan Pemerintah ke DPR.

Sekali lagi, tidak ada kriteria latar belakang suku, agama, maupun politik apapun yang berkaitan dengan batas ini. Kriteria yang dipakai murni peringkat kesejahteraan keluarga tersebut. Maka, program kompensasi akan menguntungkan pendukung semua partai. Program ini semata-mata membantu seluruh rakyat yang belum sejahtera mengatasi dampak kenaikan harga BBM.

ORANG PALING KAYA



PEMERINTAH SUDAH MELAKUKAN SURVEY. DARI SURVEY TERSEBUT DIPEROLEH DATA 40% KELUARGA YANG TINGKAT KESEJAHTERAANNYA PALING RENDAH







40%
HASIL SURVEI



25%

65,7 JUTA JIWA ATAU 15,5 JUTA KELUARGA

YANG MENDAPAT KOMPENSASI

MISKIN





29,6 JUTA JIWA DI BAWAH GARIS KEMISKINAN

Mereka yang Tidak Miskin namun Rentan Kembali Jatuh Miskin Turut Menikmati

Yang patut kita catat, banyak orang yang TIDAK tergolong miskin juga turut menikmati program kompensasi. Sebab, saat ini, saudara-saudara kita yang termasuk miskin adalah 11,66 % dari jumlah penduduk atau 29,6 juta jiwa.

Sementara, usul Pemerintah kepada DPR, penerima program kompensasi akan mencakup 26,78 % dari penduduk Indonesia atau 65,67 juta jiwa. Ini berarti Pemerintah memberi kompensasi dan tetap memperhatikan mereka yang sudah hidup di atas garis kemiskinan. Kita sama-sama menyadari, mereka itu masih rentan untuk jatuh kembali hidup di bawah garis kemiskinan maka perlu mendapat bantuan.



Dari Jatah Beras Miskin, Bantuan Siswa Miskin hingga Dana Tunai

Ringkasnya, kompensasi untuk rakyat miskin terdiri dari lima program:

- Beras untuk rakyat miskin (Raskin)
- Bantuan Siswa Miskin (BSM)
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Pemberian dana tunai melalui Bantuan Sosial Langsung Sementara (BLSM)
- Pembangunan infrastruktur dasar

Tiga program yang pertama: Raskin, BSM dan PKH adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini sudah berjalan. Pemerintah sudah mengusulkan kepada DPR untuk mengoptimalkan dan memperbesar manfaat yang akan dibagi ke masyarakat lewat tiga program tadi. Ini adalah bagian dari kompensasi.

Sedangkan BLSM, adalah program baru usulan Pemerintah yang berupa pembagian dana tunai. Sesuai namanya, ini hanya sementara dan khusus diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM 2013.

Sementara pembangunan infrastruktur dasar senilai Rp 6 triliun memiliki fokus pada proyek-proyek yang bersifat padat karya dan perbaikan maupun pembangunan fasilitas air bersih di kampung nelayan dan wilayah rawan air bersih. Melalui program ini ada beberapa hasil yang dapat dicapai: ada pembukaan lapangan kerja baru, ada perbaikan lingkungan dan prasarana dasar, dan perbaikan kualitas hidup berupa akses yang lebih baik ke air bersih.

Raskin: Ada Jatah Dobel untuk Tiga Bulan

Raskin adalah program penjualan beras murah dengan harga hanya Rp 1.600 per kg. Setiap bulannya, rumah tangga peserta program ini berhak membeli 15 kg beras dengan harga super murah ini.

Sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga BBM, Pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk melipatduakan jatah beras untuk rakyat miskin di bulan Juni, Juli, dan September menjadi 30 kg per keluarga. Rumah tangga peserta Program Raskin adalah 15,5 juta jiwa, 25% keluarga dengan peringkat kesejahteraan terendah berdasarkan Basis Data Terpadu hasil survei BPS.





Agar Yang Miskin Tak Putus Sekolah Ada Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Mulai tahun ajaran 2013-2014, Pemerintah mengusulkan kepada DPR agar penerima BSM mencakup anak-anak dari 25% keluarga dengan peringkat kesejahteraan terendah. Jumlahnya 16,6 juta siswa. Tahun lalu, penerima BSM hanya 8,7 juta siswa. Mulai 2013, Pemerintah juga mengusulkan menaikkan nilai BSM sesuai jenjang pendidikan yang rinciannya tercantum pada tabel berikut.

Jenjang	2012	2013
SD/MI	Rp 360.000	Rp 450.000
SMP/MTs	Rp 550.000	Rp 750.000
SMA/MA	Rp 780.000	Rp 1.000.000

Selain itu, khusus untuk tahun 2013, siswa penerima BSM juga akan memperoleh tambahan dana tunai Rp. 200.000 per anak sebagai bagian dari program kompensasi. Dana tunai ini akan dibagikan pada bulan Agustus 2013.



Dana Tunai Bersyarat lewat Program Keluarga Harapan (PKH)

Lewat PKH, Pemerintah membagikan dana tunai bagi keluarga-keluarga termiskin. Sasarannya 2,4 juta keluarga. Pemerintah mengusulkan kepada DPR, mulai 2013 setiap keluarga mendapat dana tunai Rp 1.800.000 per tahun. Ini lebih besar daripada pembagian tahun lalu sebesar Rp 1.390.000 per tahun.

Namun pembagian dana tunai PKH itu ada syaratnya. Misalnya, keluarga termiskin itu harus rajin ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatan. Jika memiliki anak usia sekolah, keluarga itu harus menyekolahkan anaknya. Kehadiran anak di sekolah dipantau dan menjadi bagian dari persyaratan untuk memperoleh dana tunai.

Secara otomatis, anak-anak dari rumah tangga peserta PKH juga akan mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta PKH juga mendapat perlindungan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (Jamkesmas).

Dana Tunai Lewat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Selain mengoptimalisasikan program-program yang sudah ada sebelumnya, seperti Raskin, BSM, dan PKH, tahun ini Pemerintah juga akan membagikan dana tunai secara langsung. Namun pemberian dana tunai ini hanya bersifat sementara, selama beberapa bulan di tahun 2013 ini.

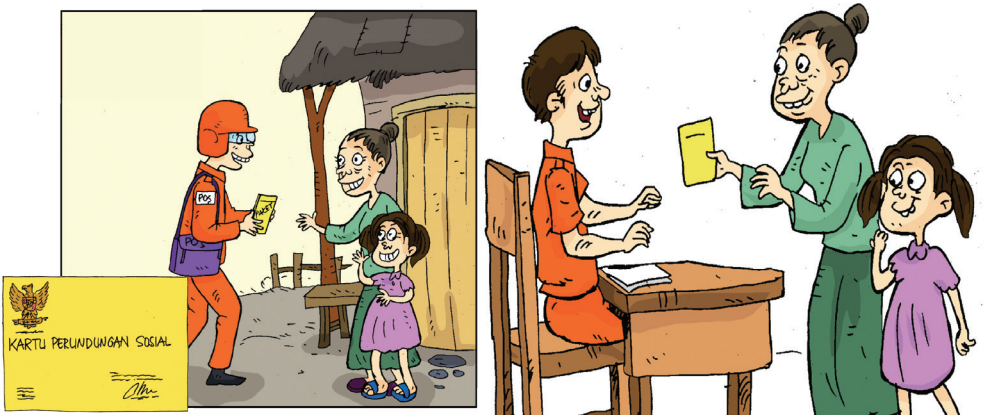


Cukup Tunjukkan Kartu Perlindungan Sosial untuk Mendapatkan Bantuan

Ada yang baru dalam pelaksanaan program-program kompensasi ini. Pemerintah memperkenalkan Kartu Perlindungan Sosial sebagai tanda pengenal penerima manfaat program-program perlindungan sosial.

Jadi, cukup dengan menunjukkan satu kartu, rumah tangga peserta program sosial yang sudah disetujui DPR dapat menerima manfaatnya. Kartu ini akan dikirim oleh PT Pos Indonesia langsung ke alamat rumah tangga yang berhak, tanpa biaya apapun. Rumah tangga yang berhak adalah 15,5 juta rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah di Indonesia.

KARTU INI AKAN DIKIRIM KE 15,5 JUTA KELUARGA MISKIN DI INDONESIA, TANPA BIAYA APAPUN

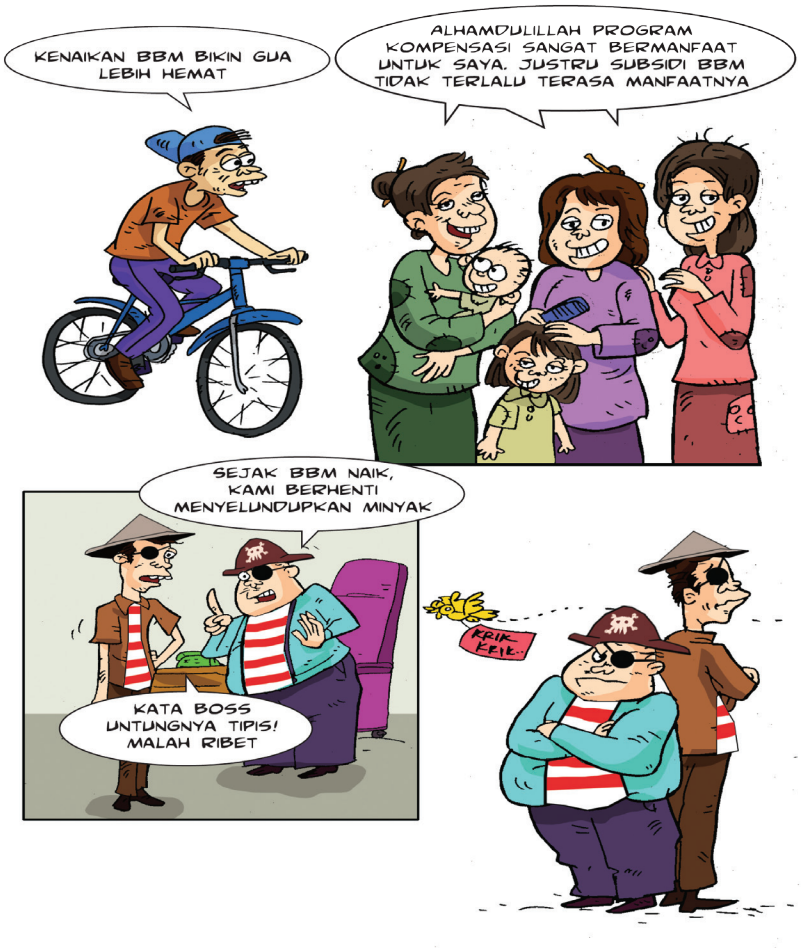




Lebih Tepat Sasaran ke Rumah Tangga Miskin daripada Subsidi BBM

Kita dapat melihat bagaimana pembagian kompensasi melalui berbagai program perlindungan sosial ini lebih efektif dan tepat sasaran. Semuanya langsung sampai ke 25% keluarga Indonesia yang peringkat kesejahteraannya paling rendah.

Sementara subsidi BBM, kenyataannya justru lebih menguntungkan masyarakat kelompok menengah-atas pemilik kendaraan pribadi.



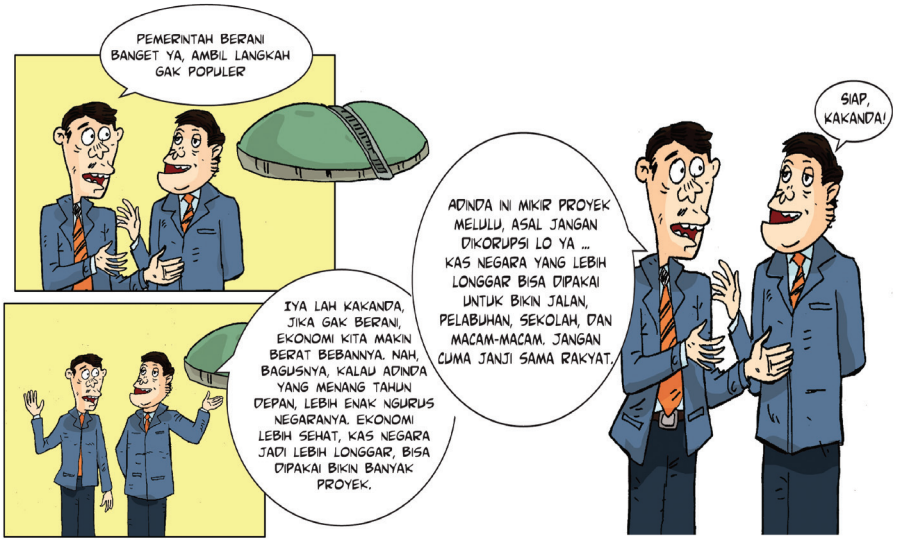
Subsidi BBM adalah Pengeluaran Negara yang Tidak Tepat

Berbagai riset dan data menunjukkan, betapa besar penyelewengan subsidi BBM. Industri yang tidak berhak banyak memakai BBM bersubsidi. Kendaraan mewah tak sungkan memakai BBM bersubsidi. Penyelundupan juga marak karena selisih harga terlalu besar. Ini semua harus kita hentikan karena merugikan rakyat dan perekonomian negara.

Manfaat Jangka Panjang, yang Lebih Menikmati Justru Pemerintah Berikut

Pemerintah menyadari, menaikkan harga BBM adalah kebijakan tidak populer. Namun, rakyat akan melihat manfaatnya yang lebih terasa di jangka panjang. Ekonomi kita akan lebih sehat karena defisit anggaran maupun defisit neraca perdagangan berkurang.

Yang lebih menikmati manfaat jangka panjang nanti adalah Pemerintah pemenang pemilihan umum 2014. Mereka lebih leluasa mengendalikan Pemerintahan karena Ekonomi kita lebih kuat. Tentu, yang penting buat kita semua adalah bukan partai mana yang menerima manfaat. Yang lebih penting adalah: ekonomi lebih sehat dan kuat, rakyat lebih sejahtera.





MARI BERSAMA-SAMA KITA MENYELAMATKAN UANG RAKYAT